

## PENGELOLAAN ARSIP DIGITAL PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG

<sup>1)</sup>Vira Aprilia, <sup>2)</sup>Yoga Ahmad Rifai, <sup>3)</sup>Yoiko Aliviannisya Rahmi

<sup>1)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunung Djati Bandung

<sup>2)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunung Djati Bandung

<sup>3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunung Djati Bandung

[Viraaprilia047@gmail.com](mailto:Viraaprilia047@gmail.com), [yogaahmad0780@gmail.com](mailto:yogaahmad0780@gmail.com), [yoikoalivia24@gmail.com](mailto:yoikoalivia24@gmail.com)

### Abstrak

Digitalisasi arsip merupakan suatu data rekaman yang bisa ditransmisikan atau diproses dengan menggunakan teknologi komputer digital. Kantor Pertanahan Kota Bandung merespon transformasi digital dengan melaksanakan digitalisasi arsip pertanahan. Digitalisasi arsip pertanahan menjadi suatu hal yang sangat urgen dan perlu dilaksanakan di kota Bandung, karena Kota Bandung menduduki peringkat pertama dalam persengketaan tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses digitalisasi arsip pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, wawancara, serta studi literatur. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah tiga orang staf pada bagian *mapping center* yaitu staf *scanning*, *uploading*, dan validasi. Hasil penelitian ini menunjukkan jika digitalisasi arsip di kantor pertanahan Kota Bandung sudah dilaksanakan secara optimal, namun terdapat beberapa permasalahan dalam aplikasi ataupun website yang digunakan untuk menyimpan arsip digital seperti error dan perlunya Jaringan yang kuat dalam mengakses website atau aplikasi tersebut.

Kata Kunci: E-Government, Arsip Digital, BPN Kota Bandung, Pengelolaan Arsip

### Abstract

*Archive digitization is a recorded data that can be transmitted or processed using digital computer technology. The Bandung City Land Office responded to digital transformation by digitizing land archives. The digitization of land archives is very urgent and needs to be carried out in the city of Bandung, because the city of Bandung is ranked first in land disputes in Indonesia. This study aims to determine the process of digitizing land archives at the National Land Agency of Bandung City. The method used for this research is a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and literature studies. The resource persons in this study amounted to three staff at the mapping center, namely scanning, uploading, and validation staff. The results of this study indicate that the digitization of archives at the Bandung City defense office has been carried out optimally, but there are several problems in the application or website used to store digital archives such as errors and the need for a strong network to access the website or application.*

Keywords : E-Government, Digital Archives, Bandung City National Land Agency, Archive Management

## A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik pada dasarnya merupakan suatu tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan hak serta perlakuan yang layak dari pemerintah dalam melakukan aktivitas dan mempertahankan eksistensinya sebagai warga negara dan agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat (Rakhmat, 2018). Namun pada kenyataannya, hingga saat ini kualitas pelayanan publik secara umum dapat dikatakan masih kurang baik, hal ini berimplikasi terhadap penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Rohayatin et al., 2018). Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini telah mempengaruhi pemerintahan menuju paradigma baru yakni era teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Dalam rangka meningkatkan pengembangan serta pelaksanaan pemerintahan yang berbasis TIK, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dikeluarkannya Peraturan Presiden ini bertujuan untuk dapat mewujudkan layanan publik berkualitas dan tatakelola pemerintahan yang transparan, efektif, serta akuntabel berbasis elektronik. Selain itu, adanya peraturan tentang SPBE ini diharapkan dapat menciptakan layanan publik yang berorientasi kepada masyarakat dan terselenggaranya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi (BPPT, 2019).

Kebijakan tersebut direspon oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yang merupakan lembaga kementerian yang bergerak melayani publik dalam hal memberikan informasi serta kepastian hukum terkait tanah dengan wujud sertipikat tanah (Anggraini & Muryono, 2021). Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat, Kementerian ATR/BPN mulai melakukan perubahan mengikuti perkembangan era TIK. Dalam rapat kerja Kementerian ATR/BPN tahun 2019, transformasi digital menjadi tema besarnya. Kementerian ATR/BPN memiliki visi untuk mewujudkan pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia.

Kantor Pertanahan Kota Bandung (ATR/BPN Kota Bandung) sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian ATR/BPN juga berupaya untuk merespon

transformasi digital. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan digitalisasi arsip pertanahan. Arsip merupakan suatu rekaman atau catatan dari kegiatan yang telah dilaksanakan yang berfungsi sebagai alat bantu untuk kepentingan administrasi, hukum, serta pembuktian-pembuktian yang otentik (Fathurrahman, 2018). Sedangkan arsip digital/elektronik merupakan data rekaman yang dapat ditransmisikan atau diproses dengan memanfaatkan teknologi komputer digital (Rifauddin, 2016).

*Focus Group Discussion (FGD)* yang dihelat di ruang rapat Gedung Rektorat UNPAR pada Rabu (22/9/2021), Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung mengungkapkan, dari total 513.058 bidang tanah yang terdaftar, baru 31 persen yang termasuk dalam Data Siap Elektronik atau sebanyak 163.280 bidang tanah. Beliau juga mengungkapkan bahwa Kota Bandung merupakan wilayah dengan kasus sengketa tanah nomor satu di Indonesia (Veratika, 2021).

Tabel 1.1.

Data Jumlah Perkara Sengketa Tanah di Kota Bandung

Tahun	Perkara
2020	118
2021	142
2022 (Maret)	33

Sumber: BPN Kota Bandung

Data tersebut merupakan hasil dari pencatatan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kota Bandung. Dari data tersebut bisa dilihat jika kasus sengketa di kota Bandung pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 pada bulan maret sudah ada 33 perkara sengketa tanah.

Maka dari itu digitalisasi arsip pertanahan menjadi hal yang sangat urgen dan perlu dilaksanakan dengan segera. Hal tersebut dikarenakan dokumen pertanahan merupakan arsip aktif dan sangat penting. Seluruh kegiatan pelayanan pada kantor pertanahan pertanahan sebelum diproses ke tahap selanjutnya perlu diserahkan pada bagian kearsipan untuk dicocokkan dengan salinan dokumen yang ada pada kantor

pertanahan. Maka dari itu dalam rangka memudahkan proses tersebut diperlukan arsip digital, agar ketika arsip tidak ditemukan masih terdapat salinan digitalnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam rangka mengetahui proses pengelolaan arsip elektronik di Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dengan judul "Pengelolaan Arsip Elektronik pada Badan Pertanahan Kota Bandung". Peneliti mencoba menggali informasi serta menggunakan teori dari Read dan Ginn terkait pengelolaan arsip elektronik yang berpedoman terhadap empat dimensi yaitu *creation and storage, distribution and use, maintenance, dan disposition*.

*International Record Management Trust* dalam (Sutirman, 2019) mendefinisikan arsip elektronik sebagai arsip yang dibuat, dihasilkan, dikirim, dikomunikasikan, diterima, maupun disimpan secara elektronik dan membutuhkan teknologi komputer dalam mengakses serta menggunakannya. Sedangkan International Council of Archives mengemukakan arsip elektronik sebagai arsip yang dapat dimanipulasi, ditransmisikan ataupun diolah dengan teknologi komputer digital.

Selain itu, (Read & Ginn, 2011) mendefinisikan arsip elektronik sebagai arsip yang penyimpanannya menggunakan media elektronik dan dapat diakses serta diubah, dimana arsip tersebut dapat berisi teks, suara, gambar, data kuantitatif, atau suara yang bersumber dari sinyal elektronik. Lebih lanjut, Read dan Ginn memaparkan empat dimensi siklus pengelolaan arsip elektronik yang meliputi *creation and storage, distribution and use, maintenance, dan disposition*.

Dimensi *creation and storage* ialah proses yang berkenaan dengan pembuatan dokumen yang melibatkan media elektronik dan sekaligus menyimpannya. Proses tersebut dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan. Dimensi *distribution and use* adalah fungsi yang berkenaan dengan pendistribusian dan pemanfaatan arsip. Proses tersebut dapat dilakukan melalui media elektronik seperti e-mail, share file, dapat pula dicetak kemudian dikirim melalui faksimil atau melalui kurir. Dimensi *maintenance* berkenaan dengan proses pemeliharaan arsip elektronik, yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan memindahkan file dan folder, menyalin file dan

folder, serta back up data. Kemudian dimensi *Disposition* berkenaan dengan kegiatan penyusutan arsip elektronik. Penyusutan arsip elektronik dapat dilakukan dengan cara migrasi data dan menghapus data.

Dalam rangka menunjang penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini dibutuhkan untuk dijadikan pedoman referensi untuk mempermudah penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

Pengarsipan elektronik sertifikat tanah untuk menjamin ketersediaan sebagai alat bukti yang sah pada sengketa pertanahan (Yani & Syafiin, 2021) arsip elektronik sertifikat ini diharapkan dapat menjadi alat bukti yang sah jika terjadi sengketa pertanahan serta dapat meminimalisasi pemalsuan sertifikat tanah dan jaminan ketersediaan arsip jika sertifikat tanah rusak atau hilang. Setelah dilakukan pengecekan elektronik, file sertifikat tanah elektronik disimpan oleh BPN dan diberikan akses hanya kepada pemilik jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Urgensi autentikasi dan legislasi arsip pertanahan hasil digitalisasi (Anindyati et al., 2020) pada penelitian ini kegiatan digitalisasi arsip pertanahan di kantor pertanahan kabupaten Sleman yang telah dilakukan sejak tahun 2014 tidak semata-mata untuk mengubah format arsip analog menjadi arsip digital tetapi diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih komprehensif terkait percepatan pelayanan pertanahan. Namun demikian keberadaan arsip hasil digitalisasi ini masih belum mampu menggantikan kedudukan arsip analog secara utuh sehingga arsip analog masih dipertahankan keberadaannya.

Evaluasi digitalisasi arsip pertanahan dan peta bidang tanah terintegrasi menuju pelayanan online (Fitrianingsih et al., 2021). Pada penelitian ini kegiatan digitalisasi arsip pertanahan di kantor pertanahan kabupaten Karanganyar hanya sebagai pekerjaan samping sebatas angka untuk menaikkan progres dashboard capaian atau PTSL. Dalam kegiatan digitalisasi arsip tersebut membantu untuk meminimalisir permasalahan terkait sulitnya melakukan pencarian hasil pertanian sehingga dapat menyelesaikan agenda kementerian ATR atau BPN dalam melaksanakan pelayanan pertanahan elektronik dan online.

Beberapa referensi di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada focus dan lokus penelitian. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada proses digitalisasi yang dilakukan dan lokus penelitian yang dipilih yaitu BPN Kota Bandung di mana belum pernah ada yang melakukan penelitian terkait arsip elektronik pada lokus tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dimana peneliti melakukan penelusuran dalam rangka mencari dan memahami sebuah fenomena sentral. Untuk memahami fenomena tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian yang telah diberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian informasi tersebut dijadikan sebuah data yang tertulis yang kemudian dianalisis. Hasil analisis tersebut dapat berupa deskripsi atau penggambaran. Selanjutnya peneliti melakukan perenungan pribadi dan menjabarkannya dengan penelitian ilmuwan terdahulu lainnya. Kemudian hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ialah *purposive sampling* (sampling bertujuan) yang mana teknik tersebut merupakan teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui melalui observasi, wawancara secara mendalam dan studi literatur (Creswell, 2016). Narasumber dalam penelitian ini berjumlah tiga orang staf pada bagian *mapping center* yaitu staf *scanning*, *uploading*, dan validasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Creation and stroge (pembuatan dan penyimpanan)*

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang di lakukan dengan staf *scanning*, proses prosedur pembuatan arsip elektronik pertama melakukan pendataan di ruang arsip berdasarkan nama kelurahan lalu dihitung dan dicatat berdasarkan nomor dokumen. Setelah itu dilakukan *scanning* kemudian diberi nama berdasarkan nomor dokumen dan disimpan pada folder berdasarkan kelurahan. Jika sudah selesai, dokumen tersebut di unggah oleh staf *uploading* ke website yang dikelola oleh Pusat

Data Dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian ATR/BPN. Lalu dokumen tersebut divalidasi oleh staf validasi.

Gambar  
Tahapan Pembuatan Arsip Digital



Sumber: Diolah Peneliti

Sedangkan penyimpanan arsip digital yang telah divalidasi selain disimpan pada website PUSDATIN. BPN Kota Bandung juga memiliki server sendiri sebagai *back up* file arsip. hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan seperti file rusak atau hilang. Sebagaimana menurut staf *scanning* “Kami memiliki back up pada hardisk untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Kami memiliki server sendiri untuk menyimpan arsip elektronik selain disimpan pada website PUSDATIN”. Pernyataan tersebut juga di benarkan pula oleh staf *uploading* “Kendala kami biasanya ada pada website yang error”

Selain itu, BPN Kota Bandung memiliki *back up* pada hardisk yang bertujuan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Karena pada web PUSDATIN terkadang mengalami masalah pada jaringan yang kurang baik dan website yang mengalami error. Sebagaimana menurut staf *scanning* “Ada juga yang di PUSDATIN tapi terkadang memiliki masalah seperti koneksi jaringan yang kurang baik dan website mengalami error” Langkah yang dilakukan oleh BPN Kota Bandung dapat dikatakan sudah tepat. Dengan memiliki server sendiri sebagai *back up* mampu untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan seperti file rusak atau hilang.

### *Distribution and use (pendistribusian dan pemamfaatan)*

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dengan staf *scanning* dan staf validasi, pendistribusian dokumen digital dilakukan dengan cara memisahkan dokumen pada folder berdasarkan wilayah kecamatan dan kelurahan. Kemudian dokumen tersebut diunggah ke aplikasi KKP dan dilakukan validasi sebelum file tersebut disimpan pada website. Sebagaimana menurut staf *scanning*: “Setelah discan disimpan filenya pada folder berdasarkan wilayah kemudian diupload dan dilakukan validasi setelahnya.

Validasi dokumen dilakukan oleh staf validasi di mana dokumen akan dicek kembali dan ditambahkan catatan-catatan yang terdapat pada buku tanah fisik. Dengan begitu, proses distribusi dokumen digital dapat dikatakan sudah cukup baik, karena dokumen sudah disusun berdasarkan wilayah, sehingga proses pencarian dokumen dapat lebih mudah apabila suatu saat dibutuhkan. Selain itu, kesalahan pada dokumen digital dapat diminimalisir karena sebelum disimpan pada aplikasi KKP terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh staf validasi.

Sedangkan dari sisi pemanfaatan, dokumen digital belum dapat dimanfaatkan secara sepenuhnya, karena pemanfaatan dokumen fisik masih sangat dominan. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini program digitalisasi dokumen pertanahan masih berada pada tahap awal. Sebagaimana menurut staf validasi.

pemanfaatan arsip fisik lebih dominan dibandingkan dengan yang digital dikarenakan untuk saat ini program digitalisasi masih pada tahap awal. Kalau sudah selesai mungkin nantinya arsip fisik akan dilebur. Karena makin lama makin penuh penyimpanan arsip fisiknya” Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, hal tersebut memang benar di mana pemanfaatan arsip fisik masih sangat dominan dan arsip fisik dengan seiring berjalannya waktu semakin bertambah. Selain itu, sebagaimana yang dikatakan oleh staf validasi semakin lama tempat penyimpanan arsip fisik akan semakin penuh. Hal tersebut perlu menjadi sebuah perhatian, karena jika tempat penyimpanan arsip fisik penuh maka proses pengelolaannya pun tidak akan berjalan dengan maksimal. Dengan begitu, proses digitalisasi arsip elektronik perlu dilakukan percepatan karena dengan hadirnya digitalisasi arsip ini akan membuat pencarian

dan penyimpanan arsip lebih efektif dan efisien.

Pemanfaatan arsip elektronik untuk saat ini adalah sarana untuk memudahkan pencarian data pihak internal. Selain itu bagi bagian pelayanan dapat memudahkan dalam mencari data atau dokumen buku tanah dan surat ukur yang dimiliki oleh pemohon. Sebagaimana yang dijelaskan oleh staf *scanning*. “Arsip elektronik memudahkan kami untuk pencarian dokumen kemudian memudahkan bagian pelayanan untuk mencari data atau dokumen buku tanah dan surat ukur yang dimiliki oleh pemohon”. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemanfaatan teknologi dalam hal kearsipan memiliki dampak yang sangat baik. Maka dari itu, pemerintah perlu terus mengembangkan sistem sesuai dengan perkembangan kebutuhan sebagaimana salah satu prinsip pelayanan publik yakni selalu melakukan pembaruan untuk mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan.

#### **Maintenance (pemeliharaan)**

Proses pemeliharaan arsip elektronik dilakukan oleh staf uploading. Pada pelaksanaan pemeliharaan dilakukan saat adanya kegiatan contohnya seperti penambahan catatan pada buku tanah yang akan ditambahkan dalam arsip fisik dan juga digital. Maka dapat dikatakan jika pemeliharaan masih belum maksimal dikarenakan dalam pelaksanaannya hanya dilakukan saat penambahan dan pengecekan saat dibutuhkan saja, seharusnya dilakukan pengecekan secara rutin supaya dapat meminimalisir masalah kehilangan atau adanya kerusakan pada dokumen.

Pada proses uploading menyebutkan jika dalam perkembangan system yang telah dilakukan pada saat ini masih dalam proses, karena masih pada tahap awal dalam pelaksanaan digitalisasi arsip, sehingga perlu adanya perbaikan dan juga pengembangan pada system supaya dapat memudahkan dalam penggunaan aplikasi. Staf uploading juga menyebutkan jika aplikasi yang digunakan saat ini dikelola oleh pusat. Dalam hal ini maka aplikasi tersebut harus tetap ditingkatkan supaya memudahkan staf dalam pengarsipan buku tanah dan beberapa dokumen penting lainnya yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut.

Dalam proteksi dan kewanitaan yang prosesnya, pihak staf uploading mengatakan

jika hal tersebut dilaksanakan oleh pusat, sehingga jika ada kesalahan dalam pengarsipan elektronik staf yang melakukan kesalahan akan terdeteksi siapa yang melakukannya secara detail seperti nama, jam saat staf melakukan kesalahan dalam mengupload data arsip masyarakat ke dalam web ataupun aplikasi. Setiap staff memiliki akses masing masing untuk melakukan upload dokumen.

“Apabila terdapat kesalahan dari arsip elektronik, maka akan diketahui siapa yang melakukannya hingga tanggal dan jam, karena tiap staf memiliki akun masing masing. Jadi Ketika ada oknum yang jail akan ketahuan oleh kami.” – staf uploading. Dapat dilihat jika dengan penggunaan arsip elektronik dapat meminimalkan kesalahan yang dilakukan oleh staf dalam mengupload data dan mengetahui pelaku yang melakukan masalah tersebut. Proteksi dan keamanan yang telah diberikan oleh pusat kepada bpn kota bandung sudah cukup optimal dalam memberikan keamanan penyimpanan dokumen arsip. Namun perlu peningkatan dan pengecekan supaya aplikasi ataupun web yang digunakan terhindar dari virus ataupun jangkauan pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kantor Badan Pertanahan Nasional kota Bandung dalam perbedaan pemeliharaan untuk arsip digital dengan arsip fisik yang dilakukan oleh staff uploading menjelaskan jika dengan penggunaan elektronik untuk menyimpan arsip lebih mudah karena akan membuat kemudahan para staff dalam pencarian dokumen arsip tersebut. Sedangkan perbedaan dengan arsip fisik perlu mencari history dari awal sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pencarian dokumen arsip seperti buku tanah ataupun surat Ukur. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan memang lebih sulit pemeliharaan pada arsip fisik perlunya ruangan yang sangat besar untuk menampung beberapa arsip fisik dan juga pemeliharaan yang dilakukan dengan cara pengecekan supaya tidak terjadi kerusakan terhadap arsip fisik. Hal tersebut menggambarkan jika penggunaan elektronik membuat efektif serta efisien terhadap pencarian arsip jika sedang dibutuhkan. Beberapa manfaat lain dengan adanya arsip elektronik akan menghemat biaya serta tenaga.

### **Disposition (penyusutan)**

Saat ini tidak ada penyusutan/penghapusan dokumen digital. Namun, jika memang sebuah dokumen hendak dihapus pada aplikasi KKP perlu mendapatkan persetujuan dari pejabat terkait. Sebagaimana yang dijelaskan oleh staf *uploading*: “Untuk saat ini belum ada penyusutan tetapi jika ada harus diajukan dan mendapat persetujuan dari pejabat terkait, namun akan dipertanyakan alasan penghapusan dokumen tersebut”. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyimpanan dokumen pada aplikasi cukup aman, karena dokumen tidak dapat dihapus dengan cara yang mudah. Sedangkan apabila terdapat perubahan dokumen, staf *uploading* menyebutkan bahwa dokumen lama tidak akan dihapus namun akan berpindah ke bagian riwayat dokumen pemilik.

Apabila ada penambahan dokumen baru, file sebelumnya tidak akan dihapus namun akan masuk ke bagian Riwayat” Hal ini menunjukkan bukti bahwa digitalisasi arsip dapat mempermudah proses tata kelola arsip. Karena dengan hadirnya digitalisasi akan mempermudah proses pencarian riwayat dokumen. Apabila dokumen fisik, proses pencariannya akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyebabkan pelayanan kurang efisien.

### **D. KESIMPULAN**

Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan pada kantor BPN kota Bandung tidak semata-mata hanya mengubah bentuk fisik ke dalam bentuk arsip digital. Kegiatan digitalisasi arsip pertanahan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dan juga mengamankan arsip. Adanya digitaria arsip ini sebagai upaya dalam menunjang efisiensi BPN kota Bandung. Maka dari itu kegiatan digitalisasi arsip yang dilakukan oleh BPN kota Bandung bukan hanya dilakukan untuk menghasilkan arsip secara digital tetapi juga dengan sebuah sistem yang memungkinkan dalam pengelolaan lebih efektif. Model pengarsipan elektronik pada buku tanah diperlukan untuk menjaga serta melindungi alat bukti buku tanah secara elektronik. Model tersebut dapat diterapkan melalui pengarsipan digital. Setelah penghasilan elektronik, kemudian file tersebut disimpan oleh BPN kota Bandung. Akan tetapi dalam prosesnya masih menemui beberapa hambatan seperti terdapat pada kendala pada website yang error dan

masalah koneksi jaringan yang kurang baik. Kelebihan dari digitalisasi arsip elektronik ini yaitu dapat memudahkan kantor BPN kota Bandung untuk pencarian dokumen. Selain itu dapat juga memudahkan bagi pelayanan untuk mencari data atau dokumen buku tanah dan surat ukur yang dimiliki oleh pemohon.

## E. REFERENSI

- Anggraini, U., & Muryono, S. (2021). Pengelolaan Warkah Digital dan Prospek Pemanfaatannya (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan). *Tunas Agraria*, 3(1), 91–115. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.69>
- Anindyati, F. D., Farid, A. H., & Andari, D. W. T. (2020). Urgensi Autentikasi dan Legalisasi Arsip Pertanahan Hasil Digitalisasi. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.121>
- BPPT. (2019). *Wujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, BPPT Gelar FGD Implementasi Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018*. Bppt.Go.Id. <https://www.bppt.go.id/berita-bppt/wujudkan-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-bppt-gelar-fgd-implementasi-peraturan-presiden-no-95-tahun-2018>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif dan Campuran*. SAGE Publications.
- Fathurrahman, M. (2018). PENTINGNYA ARSIP SEBAGAI SUMBER INFORMASI Muslih Fathurrahman. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 3(2), 215–225.
- Fitrianingsih, F., Riyadi, R., & Suharno, S. (2021). Evaluasi Digitalisasi Arsip Pertanahan dan Peta Bidang Tanah Terintegrasi Menuju Pelayanan Online. *Tunas Agraria*, 4(1), 54–81. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.135>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. ANDI.
- Read, J. S., & Ginn, M. L. (2011). *Record Management* (9th ed.). Mason, OH: South-Western Cengage Learning.
- Rifauddin, M. (2016). Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 4(2), 168–178. <https://doi.org/10.24252/kah.v4i27>
- Rohayatin, T., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & -, S. (2018). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(01), 22–36. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i01.50>
- Sutirman. (2019). *Administrasi Kearsipan Di Era Teknologi Informasi*. UNY Press. [http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310864/penelitian/Administrasi Kearsipan di Era Teknologi Informasi.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310864/penelitian/Administrasi%20Kearsipan%20di%20Era%20Teknologi%20Informasi.pdf)
- Veratika, I. (2021). *Data Siap Elektronik Baru Mencapai 31%, BPN Kota Bandung Gandeng UNPAR Selesaikan Permasalahan Tanah*. Unpar.Ac.Id. <https://unpar.ac.id/data-siap-elektronik-baru-mencapai-31-bpn-kota-bandung-gandeng-unpar-selesaikan-permasalahan-tanah/>
- Yani, A., & Syafiin, R. A. (2021). Pengarsipan Elektronik Sertifikat Tanah untuk Menjamin Ketersediaan Arsip sebagai Alat Bukti yang Sah pada Sengketa Pertanahan. *Khazanah-Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 14(1), 57–73.